

## Pendampingan Manajemen Administrasi Di Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustha Blokagung Banyuwangi

Nur Hidayati<sup>1</sup>, Nurkafidz Nizam Fahmi<sup>2</sup>

Universitas KH Mukhtar Syafaat (UIMSIA) Blokagung Banyuwangi

Email: <sup>1</sup>nurhidayati875@gmail.com, <sup>2</sup>fahminizam26@gmail.com

**ABSTRACT:** *Administrative management really needs to be understood, organized by grouping of the various tools used in the field of business, tasks, responsibilities and human resources in it, so as to be able to give coming out an organization that is in accordance with the vision and mission of the institution. In carrying out administrative management assistance at the Wustha Muadalah Education Unit (SPM), the service method or stages of implementing mentoring activities are used as follows: the first stage is the preparatory stage. The second stage is the program implementation phase. The third stage, namely the closing and review stage, carried out a thorough evaluation of the implementation of activities. The impact of the changes expected in this assistance are: a) The creation of an orderly administration. b) Complete and develop the Provider Performance Information System (SIKAP) application by adding a menu. c) Suggest an application for score and finance even though you already have the Education Management Information System (EMIS) application, minimum (a list of students' original grades before being transferred to an education report book or report card). d) Suggest all data stored in Google Drive.*

**Keywords:** *Administrative Management, Muadalah Wustha*

### Pendahuluan

Manajemen administrasi sangat perlu sekali dipahami, melakukan pengorganisasian dengan cara mengelompokkan berbagai alat yang digunakan dalam bidang usaha, tugas, tanggung jawab dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya agar mampu melahirkan organisasi yang memang sesuai dengan visi dan misi lembaga. Manajemen administrasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan madrasah, mempunyai proporsi yang signifikan dalam peningkatan kualitas madrasah. Permasalahan yang sering muncul dalam formulasi rencana strategis di madrasah terletak pada kepemimpinan kepala madrasah yang tidak mampu memproyeksikan kondisi dan keadaan masa depan. Pendapat Bryson langkah atau tahapan proses perencanaan strategis sebagai landasan berpikir untuk memproyeksikan masa depan

yaitu (a) memprakarsai dan menyepakati perencanaan strategis, (b) memperjelas misi madrasah, (c) memperjelas nilai atau tujuan madrasah, (d) menilai lingkungan internal madrasah, (e) menilai lingkungan eksternal madrasah, (f) mengidentifikasi isu strategis madrasah, (g) merumuskan strategi untuk mengelola isu, (h) menciptakan visi madrasah yang efektif untuk masa depan, (i) menentukan implementasi.<sup>1</sup> Masalah lain yang sering muncul dalam formulasi rencana strategis terletak pada kurang dimanfaatkannya data dan informasi untuk membantu kepala madrasah dalam mengambil keputusan yang akan dituangkan dalam formulasi rencana strategis.

Manajer data, dalam hal ini kepala madrasah beserta operator madrasah, perlu mendapatkan dukungan untuk upaya penatagunaan, mempertahankan dukungan itu dalam jangka panjang dan mengukur keberhasilan dalam penatagunaan data agar tercipta hasil yang efektif.<sup>2</sup> Selain itu penguatan manajemen kelembagaan dan kepemimpinan transformatif melalui pendekatan interpersonal dan intrapersonal penting dalam sebuah lembaga pendidikan baru.. Kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang dapat diterapkan dengan karakteristik kharismatik, pengaruh idealis, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, serta konsiderasi individu. *Softskill* adalah keterampilan kecakapan hidup baik untuk diri sendiri, berkelompok atau bermasyarakat yaitu berupa keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skill) maupun keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (intra personal skill) agar mampu mengembangkan produktifitas kerja secara maksimal.<sup>3</sup>

Semula Pondok Pesantren Darussalam sebagai lembaga Pendidikan Islam menerapkan pendidikan kepada para santrinya dengan sistem pengajian umum di masjid dan tempat-tempat lain. Namun demikian, setelah perkembangan berikutnya

---

<sup>1</sup> John M. Bryson. 2004. *Strategic Planning For Public and Nonprofit Organization A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement* (Third Edition), San Francisco: Jossey-Bass Publishing Co

<sup>2</sup> David Plotkin. 2021. *Data Stewardship An Actionable Guide to Affective Data Management and Data Governance* (Second Edition)

<sup>3</sup> Abdul Rahmat dan Syaiful Kadir. 2016. Manajemen Kepemimpinan dan Kemampuan Berkomunikasi Kepala Sekolah pada Kinerja Pendidik. *Jurnal Komunikasi*. Vol. 8 No.1

di mana pondok pesantren ini mempunyai tujuan mencetak kader ulama sesuai dengan tuntutan zaman, akhirnya Pondok Pesantren Darussalam berada pada satu kesimpulan untuk tetap mempertahankan ajaran-ajaran salaf yang dianggap baik dan relevan serta tidak menutup kemungkinan mengambil dan menerapkan sistem dan metode baru yang dianggap lebih baik “al-Muhafadhah ‘ala al-Qadim al-Shalih, wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Ashlah”.

Madrasah Diniyah Al-amiriyyah (MDA) merupakan lembaga pendidikan non formal yang bernaung di bawah naungan Pondok Pesantren Darussalam. Madrasah Diniyyah Al-amiriyyah ini didirikan oleh pengasuh Pondok Pesantren, KH. Mukhtar Syafa’at Abdul Ghofur pada tahun 1951 dan berjalan selama beberapa tahun dengan berlandaskan kepada pembelajaran ilmu-ilmu keislaman. Madrasah Diniyyah Al-amiriyyah Darussalam berjalan apa adanya tanpa manajemen pendidikan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena Madrasah Diniyatul Awaliyah Al-amiriyyah memiliki banyak keterbatasan, di antaranya adalah keterbatasan tenaga pengajar, SDM pengajar dan dana operasional.

Setelah beberapa tahun kemudian, Madrasah Diniyyah Al-amiriyyah ini berubah menjadi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Ula Al-amiriyyah pada tahun 2010 dengan memperbaiki beberapa kekurangan yang dimiliki.

Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Al-amiriyyah, merupakan lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Pondok Pesantren Darussalam. Latar belakang berdirinya, tentunya tidak terlepas dengan latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Darussalam yang dirintis dan didirikan oleh KH. Mukhtar Syafa’at Abdul Ghofur yang secara resmi disahkan pada tahun 1951 M.

Lahirnya Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Darussalam dilatarbelakangi oleh satu kerisauan yang sama di kalangan para alumni, wali santri, simpatisan dan masyarakat umum. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Darussalam ini didirikan setelah berkali-kali mengadakan rapat evaluasi pengurus Diniyah Al-amiriyyah Pondok Pesantren Darussalam. Di antara evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masukan informasi dari alumni, wali santri dan simpatisan bahwa banyak alumni dari berbagai pondok pesantren khususnya alumni Pondok Pesantren Darussalam yang mengalami kendala dakwah dalam menjawab problematika hukum Islam yang terjadi di masyarakat seiring dengan perkembangan zaman.
2. Masukan dari alumni, wali santri dan simpatisan bahwa kualitas santri dalam penguasaan ilmu agama Islam semakin menurun khususnya dalam bidang baca dan penguasaan kitab kuning.
3. Masukan dari alumni dan wali santri bahwa pendidikan formal yang ada di pondok pesantren dikhawatirkan menggeser kepedulian dan kemampuan santri dalam segi baca dan pemahaman kitab kuning.
4. Permohonan alumni, wali santri aktif dan simpatisan supaya Pondok Pesantren Darussalam mendirikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Al-amiriyyah.

Oleh karena itulah, KH. Ahmad Hisyam Syafa'at selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam menanggapi positif masukan yang telah diselenggarakan pada evaluasi antar pengasuh dan para alumni Pondok Pesantren Darussalam. Seiring berkembangnya zaman serta eksistensi madrasah diniyyah semakin diperhatikan oleh pemerintah khususnya Kementerian Agama dengan munculnya kebijakan penyetaraan Pendidikan Diniyyah melalui Program Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Pondok Pesantren Darussalam berkeinginan untuk mengikuti Program Penyetaraan Diniyyah tersebut.

Berdasarkan Kesepakatan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam mulailah proses Perizinan Pendirian Muadalah diurus sebagai bentuk peningkatan perkembangan madrasah diniyah Al amiriyyah. Setelah mendapatkan izin oprasional berdirilah Satuan Pendidikan Muadalah Ulya sejak tahun 2012 dengan mekanisme, bagi santri yang lulus Diniyah Takmiliyah Ulya maka juga dianggap lulus diniyah muadalah Ulya yang implikasinya santri mendapatkan Ijazah diniyah Takmiliyah dan Ijazah Muadalah Ulya yang setara dengan Lulus SLTA sederajat.

Sampai tahun 2018 mulai direncanakan muadalah ulya secara oprasional akan dijalankan terpisah dengan diniyah takmiliyah, oleh karena itu Kabid. Pendidikan dan Pengajaran Dr. KH. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A berharap sebelum Oprasional Satuan Pendidikan Muadalah Ulya di jalankan berharap adanya pendirian Satuan Muadalah Wustha sebagai rangkaian jenjang pendidikan muadalah yang ada di Pondok Pesantren Darussalam. Dan pada akhirnya pada tahun 2019 keluar izin Oprasional Satuan Muadalah Wustha, semenjak itu SPM Ulya dan SPM Wustha dijalankan terpisah dengan madrasah Diniyyah Takmiliyah.

Pada tahun 2023 ini adalah tahun ke 3 SPM Wustha melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dengan masih terhitung barunya lembaga tersebut, tim pengabdian tertarik untuk melaksanakan pengabdian di SPM Wustha.

Berdasarkan hasil kunjungan ke lokasi dan pertemuan dengan mitra yaitu Agus Ma'ruf Arwani, S.Pd. kepala SPM Wustha, diperoleh sejumlah permasalahan terkait dengan yang dihadapi oleh Agus Ma'ruf Arwani, S.Pd. khususnya sebagai pimpinan (kepala madrasah). Persoalan itu adalah sebagai berikut:

1. Program Satuan Pendidikan Muadalah ( S P M ) W u s t h a belum disusun dengan efektif, terutama untuk program-program jangka pendek.
2. Kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas penyimpan data berupa laptop dalam membantu kepala madrasah dalam manajemen administasi.
3. Minimnya pengetahuan operator yang ada terhadap manajemen administrasi.

Semua problem yang ditemukan di atas adalah permasalahan prioritas yang mendesak untuk ditemukan jalan keluarnya. Dengan adanya kegiatan PKM Pendampingan Manajemen Administrasi di Satuan Pendidikan Muadalah ( S P M ) W u s t h a ini bertujuan agar tercapainya manajemen administrasi di Satuan Pendidikan Muadalah ( S P M ) W u s t h a khususnya terkait program-program madrasah jangka pendek yang tersusun dengan efektif. Harapannya, ada dampak pada meningkatnyamutu proses pembelajaran siswa-siswi di Satuan Pendidikan Muadalah Wustho ( S P M ) pada umumnya.

Merujuk pada hasil rapat yang dilakukan oleh tim pelaksana yang terdiri dari dosen dan mahasiswa bersama kepala madrasah, diperoleh informasi bahwa mitra ingin dibantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Yaitu untuk menyelesaikan masalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam hal manajemen data khususnya program-program kegiatan jangka pendek madrasah yang masih belum ada dan kearsipan nilai siswa serta penyimpanan data baik online maupun offline yang belum lengkap.

Jadi fokus pengabdian pada PKM ini adalah fokus pada Pendampingan Manajemen Administrasi di Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustha Blokagung Banyuwangi Tahun Ajaran 2022/2023.

## Metode

Pendampingan ini menggunakan pendekatan *Asset Based Community Develpoment* (ABCD) adalah rangkaian kegiatan untuk menerapkan berbagai disiplin ilmu (multidisipliner) yang dikembangkan oleh IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi dan sekaligus merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat umumnya. Di mana pendampingan dengan pendekatan ABCD adalah jenis pendekatan kritis yang masuk dalam lingkup pengembangan masyarakat berbasis pada kekuatan dan aset yang dimiliki masyarakat tersebut. Sebuah pendekatan yang sangat menekankan kepada kemandirian masyarakat dan terbangunnya sebuah tatanan di mana warga aktif menjadi perilaku dan penentu pembangunan.<sup>4</sup>

Secara prinsip, pendekatan ABCD merupakan pendekatan yang dimulai dari segala sesuatu yang berada dalam komunitas sebagai asset atau aset yang positif. Di mana semuanya mengarah kepada konteks pemahaman dan internalisasi aset, potensi, kekuatan, dan pendaayagunaannya secara mandiri dan maksimal. Adapun paradigma dan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat berbasis ABCD adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2022. *Pedoman Hibah Kolaboratif Penelitian dan PKM*. Banyuwangi: LPPM Press, hal 17

<sup>5</sup> Ibid, hal 18

1. Setengah terisi lebih berarti (half full and half empty). ABCD berfokus pada bagian gelas yang terisi. Bagian yang terisi ini dapat berupa kekuatan, kapasitas, dan aset komunitas. Beberapa komunitas seringkali lebih berfokus pada bagian yang kosong, sehingga melupakan aset yang dimiliki.
2. Semua punya potensi (no body has nothing). Setiap manusia terlahir dengan kelebihan masing-masing. Tidak ada yang tidak memiliki potensi, walau hanya sekedar kemampuan untuk tersenyum dan memasak air. Semua berpotensi dan semua bisa berkontribusi. Seperti intisari ayat sebagai berikut: "Manusia yang cerdas adalah manusia yang menyadari kelebihan yang dimiliki". (QS. Ali Imron: 191)
3. Partisipasi (participation). Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian modal atau materi, serta ikut memanfaatkan menikmati hasil-hasil pembangunan.
4. Kemitraan (partnership). Secara istilah partnership adalah "a relationship between individuals or groups that is characterized by mutual cooperation and responsibility, as for the achievement of a specified goal" dengan maksud hubungan yang dibangun antara beberapa individu atau grup yang didasari oleh kerja sama dan tanggung jawab yang sama dalam menggapai tujuan tertentu.
5. Penyimpanan positif (positive deviance). Yaitu sebuah pendekatan terhadap perubahan perilaku individu dan sosial yang didasarkan pada realitas bahwa dalam setiap masyarakat meskipun bisa jadi tidak banyak terdapat orang-orang yang mempraktekkan strategi atau perilaku sukses yang tidak umum, yang memungkinkan mereka untuk mencari solusi yang lebih baik atas masalah yang dihadapi daripada rekan-rekan mereka.



6. Berasal dari dalam masyarakat (endogenous). Istilah endogenous secara bahasa berarti dari dalam, dikembangkan dari dalam “masyarakat”. Pemaknaan kata endogenous akan mengikuti sub kata yang disifatinya. Sehingga ketika kata yang disifati dan muncul sebelumnya adalah pembangunan, maka pembangunan endogen berarti pembangunan yang dikembangkan dari dalam masyarakat sendiri. Dalam penggunaannya, kata-kata endogenous seringkali digunakan untuk mensifati pembangunan. Sehingga yang sering muncul kemudian adalah istilah local endogenous dan istilah pembangunan endogen. Pembangunan endogen sendiri sebagaimana telah disinggung sebelumnya mengandung arti pembangunan yang berdasar dari dalam konteks atau komunitas tertentu atau pembangunan yang dikembangkan dari dalam masyarakat.
7. Mengarah pada sumber energi (heliotropic). Yaitu istilah untuk menggambarkan proses berkembangnya tumbuhan yang condong mengarah kepada sumber energi, demikian juga komunitas. Energi dalam pengembangan komunitas bisa beragam. Diantaranya adalah mimpi besar yang dimiliki oleh komunitas, proses pengembangan yang apresiatif, atau bisa juga keberpihakan anggota komunitas yang penuh totalitas dalam pelaksanaan program, sumber energi ini layak nya keberadaan matahari bagi tumbuhan.

Adapun metode pengabdian atau tahap pelaksanaan kegiatan pendampingan manajemen data kepala madrasah adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Di tahap ini dilaksanakan persiapan surat menyurat, pencatatan, penyiapan lokasi, dan alat kegiatan. Ketua dan anggota mengumpulkan informasi terkait data yang diperlukan untuk menunjang tersedianya program-program jangka pendek bagi sekolah dan data kearsipan yang belum lengkap.
2. Tahap kedua adalah tahap implementasi program. Pada tahap ini dilaksanakan pendampingan, dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan dengan memberikan pelatihan kepada operator sekolah, staf tata usaha dan kepala madrasah terkait manajemen administrasi.



3. Tahap ketiga yaitu tahap penutupan dan *review*, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kegiatan dan menyusun laporan untuk dipresentasikan pada waktu seminar hasil.

Pemilihan subjek dampingan pada pendampingan manajemen administrasi di Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustha adalah kepala madrasah, operator dan ketua tata usaha karena mereka adalah sumber utama informasi sekolah serta karena Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustha merupakan sekolah baru yang belum meluluskan dan berbasis diniyyah yang muadalah sehingga harapannya bisa sesuai harapan masyarakat dan pemerintah dengan distingsi keilmuam serta penerapan manajemen administrasi yang baik dari awal.

## Hasil Dan Diskusi

### 1. Hasil

Dampak perubahan yang diharapkan pada pendampingan ini adalah:

- a. Terciptanya tertib administrasi



**Gambar 1. PSPDB SPM Muadalah Wustha Online  
(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023)**

- b. Melengkapi dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) dengan menambah menu, menambahkan item pada formulir Penerimaan Santri dan Peserta Didik Baru (PSPDB) SPM Wustha yaitu pada bagian identitas

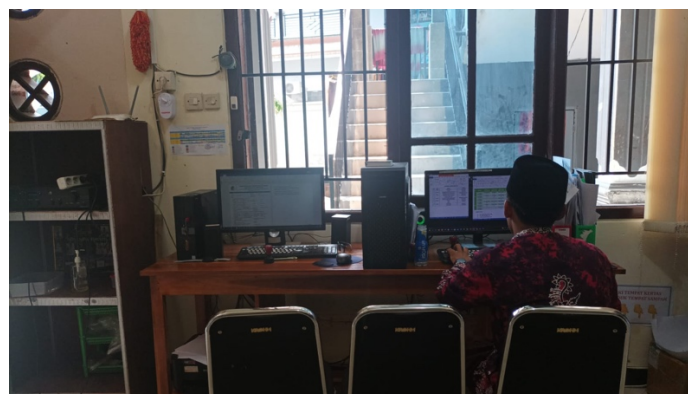
SPM Wustha Al-Amiriyyah Blokagung (minimal ditambah kata Blokagung), nama panggilan, ciri-ciri, upload ijazah dan transkrip nilai terakhir, upload KIA, pilih asrama, minat atau bakat, prestasi upload piagam (jika ada), penghasilan orang tua (dipilih dalam skala), mengenal SMP Wustha Al-Amiriyyah Blokagung (sediakan pilihan), alasan memilih SMP Wustha Al-Amiriyyah Blokagung.

- c. Menyarankan aplikasi untuk bagian nilai dan keuangan walaupun sudah memiliki aplikasi Education Management Information System (EMIS), minimal leger (daftar nilai asli siswa sebelum dipindahkan ke dalam buku laporan pendidikan atau raport)



**Gambar 2. Kegiatan Pendampingan  
(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023)**

- d. Menyarankan semua data disimpan pada Google Drive



**Gambar 3. Tempat Operator Bekerja  
(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023)**

## **2. Diskusi Keilmuan**

### **a. Pentingnya manajemen administrasi**

Menurut Sukarman Purba mendefinisikan administrasi pendidikan yaitu segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personil, spiritual maupun material, yang bersangkutan paut dengan pencapaian tujuan pendidikan.<sup>6</sup> jadi, di dalam proses administrasi pendidikan segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan, diorganisasikan dan dikoordinasi secara efektif dan semua materi yang diperlukan serta yang telah ada dimanfaatkan secara efisien. Administrasi dalam sebuah instansi menjadikan bagian yang penting dalam roda tata administrasi sekolah. Administrasi itu sendiri merupakan sebuah upaya menjadikan kegiatan dan kerjasama anggota organisasi serta komponen-komponen lainnya menjadi efektif dan efisien. Tanpa disadari manusia selalu dikaitkan dan dibingungkan dengan prosedur masalah administrasi, karena tata administrasi itu sendiri berhubungan dengan sebuah "purpose", cara-cara individu bekerja, serta pemanfaatan sumber-sumber yang ada secara efektif dan efisien.

### **b. Fasilitas yang memadai**

Fasilitas dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Di Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustha masih terdapat satu komputer untuk operator putra dan satu komputer untuk operator putri. Semoga dengan terus berkembangnya Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustha komputer sebagai pusat pangkalan data bisa ditambah lagi oleh pihak Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi karena tim pengabdian belum bisa memberikan komputer untuk Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustha.

---

<sup>6</sup> Sukarman Purba dkk, 2021. *Administrasi Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 6

**c. Madrasah berbasis pesantren yang punya distingsi kuat karena muadalah**

Tiga lembaga pendidikan Islam yang mendapat muadalah adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta, Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, dan Pondok Pesantren Diniyah Formal (PDF) yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama RI. Khusus untuk MBS dan Madrasah Muallimin Muhammadiyah, penyetaraan ijazah diberikan pada program IPS (ilmu-ilmu Sastra dan Humaniora) dan IPA (ilmu-ilmu Eksakta), sedangkan untuk PDF penyetaraan diberikan pada program IPS. Maka dari itu pendampingan manajemen administrasi perlu diadakan di Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustha untuk tetap berkarakter, selanjutnya harus dipahami pentingnya manajemen administrasi.

Manajemen administrasi secara umum adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang erat kaitannya dengan pengaturan suatu kebijakan di dalam perusahaan agar tujuan perusahaan bisa terwujud secara baik. Pengertian administrasi secara khusus adalah suatu bentuk kegiatan yang mencakup pencatatan, penyuratan, pembukuan sederhana, pengetikan pada komputer, serta aktivitas lain yang bersifat teknis dalam hal ketatausahaan.

George R. Terry (2010) menjelaskan bahwa manajemen administrasi adalah suatu kegiatan perencanaan, pengendalian, pengorganisasian pekerjaan dan juga pergerakannya dilakukan untuk meraih tujuan yang sebelumnya memang sudah ditetapkan.<sup>7</sup> Disisi lain, Millis Geoffrey (2008) menjelaskan bahwa manajemen administrasi adalah suatu proses pembimbingan personil perusahaan dalam hal menggunakan sarana dan juga prasarana yang tersedia agar bisa mencapai tujuan bisnis yang sudah ditentukan.<sup>8</sup>

Jadi, manajemen administrasi adalah salah satu ilmu manajemen yang mampu memberikan informasi layanan administrasi agar bisa melakukan operasional secara lebih maksimal. Manajemen administrasi ini sangat

---

<sup>7</sup> Engkoswara, Aan Komariah. 2020. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta, hal 3

<sup>8</sup> Ibid, hal 10

mempengaruhi kelancaran pada divisi lainnya dan juga kerap kali dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam mengambil suatu kebijakan. Walaupun begitu, manajemen administrasi selalu menjadi bentuk kekuatan yang tidak terlihat. Namun ketika Anda salah dalam mengelolanya, maka yang akan terjadi adalah kekacauan yang sangat banyak sekali.

**d. Pengakuan yang sama disetarakan dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)**

Bentuk pengakuan Pendidikan Keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: "Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus". Kemudian pada pasal 30 ayat (1) menyebutkan: pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat (2) berbunyi: pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Dalam ayat (3) disebutkan: pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dan ayat (4) berbunyi: pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Sebagai tindak-lanjut amanat Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara memberikan payung hukum penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam, termasuk kepada pondok pesantren melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindak-lanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan

Islam. Terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pondok pesantren, sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.

Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Pesantren dan atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Satuan pendidikan pesantren atau pesantren sebagai satuan pendidikan adalah pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan mu'allimin pada jalur pendidikan nonformal.

Santri, yaitu peserta didik pada satuan pendidikan pesantren yang hanya mengikut pengajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan mu'allimin dikatakan sebagai "santri hanya mengaji", karena memang mereka tidak mengikuti pendidikan formal seperti sekolah, madrasah, ataupun program pendidikan kesetaraan. Ada semacam rasa ketidakadilan ketika santri tersebut yang pada dasarnya mengikuti pembelajaran dengan beban yang relatif sama dan kompetensi yang sederajat dengan pendidikan formal, namun tidak mendapat pengakuan atau rekognisi yang setara dengan peserta didik pada pendidikan formal lainnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian Agama telah menyelenggarakan satuan Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren yang merupakan entitas kelembagaan pendidikan keagamaan islam jenjang Pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, serta pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang merupakan bagian dari ikhtiar Kementerian Agama dalam rangka percepatan program Wajib Belajar, untuk menghasilkan lulusan *mutafaqqih fiddin* (ahli ilmu agama islam) dan memberikan civil effect yang sama yaitu pengakuan kesetaraan lulusan pesantren dengan pendidikan formal. Namun belum semua pesantren

dapa menjadi penyelenggara satuan Pendidikan Diniyah Formal, Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren, ataupun pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah mengingat ketatnya persyaratan yang ditetapkan.

Mengingat bahwa masih banyak santri hanya mengaji, dan fakta bahwa banyak lulusan pesantren yang sampai saat ini belum mendapatkan penghargaan sederajat atau kesetaraan dengan pendidikan formal dipandang perlu untuk adanya mekanisme rekognisi lulusan pesantren dalam rangka memberikan penghargaan sederajat atau kesetaraan dengan pendidikan formal tersebut.

Dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dinyatakan bahwa hasil pendidikan keagamaan nonformal dan atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan atau pemerintah daerah. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dinyatakan bahwa hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh direktur jenderal. Ini yang kemudian menjadi dasar bagi Kementerian Agama untuk dapat menyelenggarakan ujian dalam rangka memberikan penghargaan sederajat atau kesetaraan dengan pendidikan formal keagamaan Islam bagi lulusan pesantren sebagai satuan pendidikan, dalam bentuk Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan.

#### **e. Pendidikan formal berbasis kitab kuning**

Bisa membaca dan pemahaman terhadap kitab kuning menjadi ciri khas dari Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustha. Kitab kuning salah satu kitab klasik yang memiliki peran penting dalam transformasi ilmu agama. Dikatakan sebagai kitab kuning karena kitab ini dicetak di kertas yang berwarna kekuning-kuningan.



Ciri khas dari kitab kuning selain dicetak di kertas berwarna kuning, isi tulisan tidak ada harokat, alias gundul. Karena program unggulan di Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustha Blokagung adalah Mahir Baca Kitab (Putra dan Putri). Ijazah sama dengan SLTP dan diakui Negara.

## Simpulan

Tingkat ketercapaian target kegiatan PKM ini cukup baik, hal ini terindikasi dari antusiasnya operator, staf tata usaha dan kepala madrasah bertanya dan berkonsultasi mengenai manajemen administrasi. Dampak dari kegiatan ini adalah munculnya semakin tertatanya data dan program kerja kepala madrasah sehingga para guru dan siswa lebih terarah dalam proses pembelajaran dan keadministrasian. Tertatanya administrasi kurikulum yang berhubungan dengan bagian perencanaan kurikulum pendidikan mulai dari metode sampai sistem, administrasi peserta didik, dan administrasi tata usaha. *Program kurikulum*, mendalami kurikulum yang dipakai, menyusun soal yang benar dan baik, menyusun program pengajaran (membuat program semester, satuan pengajaran dan rencana pengajaran), mengadakan penilaian (membuat leger), penilaian ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian sekolah. *Program peserta didik*, mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh SPM mengacu pada keputusan yayasan dan Kementrian Agama, jumlah siswa yang diterima, kriteria penerimaan, pelaksanaan oleh panitia yayasan. *Program tata usaha*, menyempurnakan file guru, karyawan, siswa, perlengkapan dan keuangan dalam upaya meningkatkan administrasi madrasah. Melalui kegiatan ini, Tim pelaksana PKM berusaha mencapai tujuan bersama mitra yang bersesuaian dengan tujuan umum adanya PKM yaitu mendorong terciptanya harmoni dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya dan khususnya di Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustha.

## Daftar Referensi

- Abdul Rahmat dan Syaiful Kadir. 2016. Manajemen Kepemimpinan dan Kemampuan Berkomunikasi Kepala Sekolah pada Kinerja Pendidik. *Jurnal Komunikasi*. Vol. 8 No.1
- Arifin, Imron. 2000. *Kepemimpinan*. Bogor: Bulan Bintang
- Bryson, John M. 2004. *Strategic Planning For Public and Nonprofit Organization A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement* (Third Edition), San Francisco: Jossey-Bass Publishing Co
- David Plotkin. 2021. *Data Stewardship An Actionable Guide to Affective Data Management and Data Governance* (Second Edition)
- Engkoswara, Aan Komariah. 2020. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah dalam Pidato pada Peringatan Hari Jadi Ke-28. Jakarta: Pusat Kesenian Jakarta
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2022. *Pedoman Hibah Kolaboratif Penelitian dan PKM*. Banyuwangi: LPPM Press
- Sukarman Purba dkk, 2021. *Administrasi Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis
- Sumarjo, dkk. 2004. *Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat*. Bogor: Departemen Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi Fakultas Pertanian IPB
- Tatang. 2017. *Adimistrasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia